

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Maladewa merupakan negara yang berhasil mengembangkan sektor pariwisata ditengah-tengah persoalan perekonomian nasional yang tidak memiliki sektor lainnya cukup potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Sejak lama negara ini menghadapi persoalan perekonomian yang berdampak pada ketertinggalan pembangunan dibandingkan negara-negara yang terletak di wilayah yang sama, seperti halnya Srilanka, Nauru, Palau dan beberapa negara lainnya. Ini disebabkan secara *political will* pemerintah Maladewa sejak dekade 1970-an cukup stabil dengan perdagangan dan eksplorasi hasil laut, khususnya ikan tangkap. Kemudian pada akhir dekade 1990-an ketika negara-negara dunia mulai mengembangkan pembangunan infrastruktur maka Maladewa berupaya mencari solusi jangka menengah dan panjang untuk mendukung percepatan pembangunan yang disetujui oleh parlemen dan eksekutif pada tahun 2004 dimana sektor pariwisata akan dimasukkan dalam garis besar tujuan nasional Maladewa (*2004 Maldives Development Guidance*).

Pariwisata nasional Maladewa sebenarnya telah melalui rangkaian sejarah yang panjang karena menjadi warisan masa lalu ketika negara masih berbentuk monarki (kesultanan) yang keberadaan Maladewa sebagai wilayah kepulauan (archipelagos) membuat negara ini memiliki berbagai pantai dan ekosistem tropis yang menjadi daya tarik masyarakat internasional. Pengelolaan pariwisata yang terus dijalankan oleh pemerintah Maladewa mampu membawa perkembangan pariwisata negara ini ke arah yang lebih baik yang ditandai dengan diterbitkannya berbagai kebijakan nasional pada bidang pariwisata. Kondisi ini kemudian menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara yang secara reaktif berupaya berkunjung ke wilayah Maladewa sebelum

dekade 2000-an melalui jalur perairan melewati Srilanka karena pada masa ini jalur penerbangan menuju dan dari Maladewa cukup terbatas. Kemudian terdapat juga tren kunjungan wisatawan asing berulang (*repeting foreign tourist*) yang sekaligus menegaskan bahwa potensi pariwisata Maladewa cukup besar sehingga mampu mendorong wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke negara ini, meskipun keberadaannya belum dikelola secara optimal dan fasilitas, serta infrastruktur juga belum cukup memadai.

Keberadaan sektor pariwisata Maladewa kemudian mampu memberikan berbagai pencapai/dampak baik pada bidang politik, sosial dan ekonomi. Berlahan-lahan Maladewa mampu berkembang sebagai negara tujuan wisata baru kelas dunia. Berbagai pencapaian Maladewa dalam pengembangan bidang pariwisata ternyata tidak lepas dari berbagai strategi dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*decision maker*). Kemudian pada sisi yang lain, masyarakat, swasta hingga pelaku usaha juga dilibatkan dalam berbagai kebijakan pengembangan pariwisata nasional sejak tahun 2008. Secara garis besar kebijakan ini dapat dibedakan menjadi dua, masing-masing adalah kebijakan dalam negeri (*tourism domestic policy*) dan kebijakan luar negeri (*tourism foreign policy*) yang keduanya dapat saling melengkapi dalam menunjang kemajuan pariwisata Maladewa.

Kondisi pariwisata Maladewa yang sebelum periode 2008 menjadi sektor sekunder dalam mendukung perekonomian nasional kemudian menjadi prioritas ketika Presiden Mohammed Wahhed Hassan menerima rekomendasi dari kementerian pariwisata bahwa berdasarkan kajian nasional yang dipimpin oleh Mariyam Zulfa berinisiatif untuk memprioritaskan sektor pariwisata sebagai tindak lanjut dari desk front pada tahun 2000. Delapan tahun kemudian secara sah pemerintah Maladewa mencanangkan tahun pariwisata dengan mempersiapkan berbagai infrastruktur dan layanan dasar sehingga pariwisata Maladewa dapat berkembang tanpa tergantung dengan negara lainnya.

Implementasi kebijakan dalam negeri ini meliputi pengembangan pariwisata nasional Maladewa meliputi upaya dalam membangun stabilitas/kondusifitas politik-keamanan domestik, yaitu dengan mengembangkan sistem demokrasi konsosiasional. Artinya berbagai entitas politik Maladewa diantaranya kelompok kepentingan, partai politik dan unsur lainnya sepakat untuk mengedepankan stabilitas politik keamanan demi membangun pariwisata nasional yang progresif. Sejak pemilu tahun 2013 memang persaingan antara partai politik memang cukup tajam, khususnya antara PPM (*Progresif Party of Maldives*) yang mengusung nasionalisme, Islamisme dan konservatisme melawan MDP (*Maldivian Democratic Party*) yang mengusung environmentalisme dan liberalisme menjadi sangat tajam. Ini disebabkan partai tersebut saling berafiliasi dengan partai-partai kecil dan kemudian membawa persaingan antara basis massa yang membahayakan persatuan antar masyarakat Maladewa.

Kebijakan domestik selanjutnya adalah dengan pengembangan infrastruktur pariwisata, dimana sejak tahun 2008-2018 telah mengembangkan layanan terintegrasi meliputi dermaga, transportasi darat hingga dermaga dengan menghabiskan anggaran sebesar puluhan juta US Dollar, serta juga mengembangkan sumber daya manusia melalui pembukaan tuis pariwisata pada beberapa sekolah tinggi sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang efektif dalam menghadapi tantangan pariwisata internasional, diantaranya melalui pengembangan pariwisata dengan beberapa perguruan tinggi dalam negeri Maladewa, diantaranya Maldives National University ataupun Mandhu College dan Villa College sebagai upaya nyata dalam mengembangkan pengetahuan dan pembangunan pariwisata nasional.

Kemudian kebijakan luar negeri meliputi kerangka G to G (*government to government*), yaitu pengembangan kerjasama antara Maladewa dengan organisasi SAARC (*South Asian Association For Regional Cooperation*), dimana organisasi yang menaungi negara-negara yang terletak di

wilayah Samudera Hindia ini juga fokus pada bidang pengembangan pariwisata internasional. Melalui kerjasama ini nantinya Maladewa dapat mengakses promosi bersama yang terintegrasi dengan negara-negara Asia Selatan. Kemudian kerjasama selanjutnya dijalankan oleh Maladewa dengan dan G to B (*government to bussiness*) melalui investasi dan pengembangan pariwisata internasional terintegrasi diantaranya dengan perusahaan *The Body Shop* untuk dapat memberikan layanan akomodasi terhadap wisatawan yang menginap, sehingga layanan bagi wisatawan dapat berstandar internasional dan *Swiss Contact* untuk mendukung promosi luar negeri dan pendanaan mikro serta promosi luar negeri di berbagai ajang dan even internasional di wilayah Asia hingga Eropa yang pada akhirnya dapat mengembangkan Maladewa sebagai destinasi pariwisata internasional.

B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis dapat memberikan saran bagi stakeholder (pemangku kepentingan) Indonesia dan para akademisi hubungan internasional bahwa:

- a. Bagi para pemangku kepentingan bahwa pariwisata merupakan potensi yang perlu dikembangkan oleh negara-negara dunia sebagai pilar penopang perekonomian nasional. Jika dikaitkan dengan kasus pengembangan pariwisata di Indonesia maka pemerintah bersama dengan stakeholder lainnya perlu untuk mengajak masyarakat dan swasta dalam skala yang lebih luas untuk dapat membuka destinasi pariwisata baru sehingga nantinya dapat menumbuhkan *multiplier effect* yaitu terbukanya daerah-daerah yang terisolir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat rural di Indonesia.
- b. Bagi kalangan akademisi perlu diteliti lebih lanjut tentang perbandingan kebijakan pengembangan pariwisata antara Maladewa dengan negara lainnya, sebagai contoh Timor Leste, Belarus, Kirgistan dan beberapa negara lain yang secara progresif berupaya

mengembangkan sektor pariwisatanya sebagai penopang perekonomian nasional. Nantinya diharapkan dapat diketahui tentang kelebihan dan kelemahan kebijakan-kebijakan untuk dapat membuka paradigma baru tentang perkembangan pariwisata internasional.